Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No 12, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI MELALUI PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA DI KOTA SURABAYA

Anis Nadiya[1], Marinda Putri Ketieriella[2], Annisa'ul Fitriah[3], Taurista Rachma Safrina[4], Indah Prabawati[5], Meirinawati[6]

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: anis.23015@mhs.unesa.ac.id, marinda.23017@mhs.unesa.ac.id, annisaul.23023@mhs.unesa.ac.id, taurista.23014@mhs.unesa.ac.id, indahprabawati@unesa.ac.id, meirinawati@unesa.ac.id

Abstract

Ensuring equitable access to higher education remains a challenge, particularly for individuals from low-income families facing economic constraints. The Surabaya City Government is working to address this issue through the "One Family, One College Graduate" Program, which involves various stakeholders in supporting the sustainability of higher education. This study aims to analyze collaborative governance in realizing equitable access to higher education through this program in Surabaya. This study employs a qualitative, descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation with informants selected through purposive sampling, including representatives from the Social Affairs Office, the Regional Development Planning Agency (Bappeda), higher education institutions, and student beneficiaries. Data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldaña model, which includes data condensation, data presentation, and the drawing and verification of conclusions. The results indicate that the program's implementation involves collaboration between local governments and both public and private universities, analyzed through the four dimensions of Collaborative Governance proposed by Ansell and Gash (2008): initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and the collaborative process. Although this collaboration has supported the provision of educational assistance, its implementation still faces challenges in the form of limited program capacity and eligibility requirements that not all members of the target population can meet.

***Keywords**: Collaborative Governance, educational equality, higher education, One Family One Scholar Program.*

Abstrak

Pemerataan akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu yang memiliki keterbatasan ekonomi. Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana yang melibatkan berbagai pihak dalam mendukung keberlanjutan pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui program tersebut di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pihak Dinas Sosial, Bappeda, perwakilan perguruan tinggi, dan mahasiswa

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagirism Checker No 2635

Copyright : Author
Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

penerima manfaat. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri maupun swasta yang dianalisis melalui empat dimensi *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008), yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Meskipun kolaborasi telah mendukung penyediaan bantuan pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas program dan persyaratan penerima manfaat yang belum dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat sasaran.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, pemerataan pendidikan, pendidikan tinggi, Program Satu Keluarga Satu Sarjana.

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan suatu daerah. Melalui pendidikan tinggi, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan zaman dan persaingan dunia kerja. Pendidikan juga tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Seseorang yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi diharapkan mampu meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik serta membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Menurut Tilaar (2012), pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk manusia yang mampu menghadapi perubahan masyarakat dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi perlu menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Meskipun pendidikan tinggi memiliki peran penting, kenyataannya kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi masih belum sepenuhnya merata. Tidak semua lulusan sekolah menengah memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan karena terdapat perbedaan kondisi ekonomi, lingkungan keluarga, akses informasi, dan kemampuan akademik. Bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi baik, biaya pendidikan tinggi mungkin bukan menjadi hambatan utama. Namun, bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, biaya kuliah dapat menjadi beban yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan perguruan tinggi saja belum cukup untuk menjamin pemerataan akses pendidikan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan tersebut, terutama bagi kelompok keluarga kurang mampu yang membutuhkan dukungan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Tilaar & Nugroho, 2016).

Permasalahan pemerataan pendidikan tinggi juga dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), APK perguruan tinggi Indonesia pada tahun 2025 sebesar 32,89%, sedangkan Provinsi Jawa Timur mencapai 32,40%. Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi masih belum mencakup sebagian besar penduduk pada kelompok usia yang menjadi dasar perhitungan indikator tersebut. APK memang tidak secara langsung menjelaskan penyebab seseorang tidak melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi dapat memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi masyarakat pada jenjang tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih diperlukan berbagai upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh

pendidikan tinggi, terutama melalui kebijakan yang dapat mengurangi hambatan ekonomi dan sosial (Badan Pusat Statistik, 2025).

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi adalah keterbatasan ekonomi keluarga. Biaya pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran uang kuliah, tetapi juga mencakup kebutuhan lain seperti transportasi, buku, perangkat pembelajaran, internet, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari selama menjalani perkuliahan. Bagi keluarga kurang mampu, pengeluaran tersebut dapat menjadi pertimbangan besar karena harus dibagi dengan kebutuhan pokok rumah tangga. Bahkan, terdapat keluarga yang harus mempertimbangkan apakah anaknya akan melanjutkan pendidikan atau langsung bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Suryadi (2012) menjelaskan bahwa pemerataan pendidikan berkaitan dengan kemampuan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial ekonomi untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi tidak hanya menjadi persoalan biaya masuk perguruan tinggi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan mahasiswa untuk mempertahankan pendidikannya sampai selesai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan kesempatan pendidikan. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan afirmatif (affirmative action), yaitu kebijakan yang memberikan dukungan atau perlakuan khusus kepada kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan sosial maupun ekonomi. Dalam bidang pendidikan, kebijakan afirmatif dapat diwujudkan melalui pemberian beasiswa, bantuan biaya kuliah, dan dukungan biaya hidup bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Menurut Tilaar dan Nugroho (2016), kebijakan pendidikan perlu memperhatikan prinsip keadilan agar kesempatan memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka secara formal, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, bantuan pendidikan menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi.

Permasalahan tersebut juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Surabaya memiliki berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Namun, keberadaan perguruan tinggi yang cukup banyak tidak secara otomatis membuat seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkuliah. Masih terdapat keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi sehingga kesulitan membiayai pendidikan anaknya sampai jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan data BPS Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sekitar 105,09 ribu jiwa atau sebesar 3,56%. Meskipun persentase kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025).

Sebagai bentuk perhatian terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menghadirkan Program Satu Keluarga Satu Sarjana. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga kurang mampu agar setidaknya terdapat satu anggota keluarga yang dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan tinggi. Program tersebut memiliki tujuan yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang. Melalui program ini, pendidikan tinggi diharapkan dapat menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, Program Satu Keluarga Satu Sarjana menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam mengurangi hambatan ekonomi sekaligus memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kota Surabaya.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan tinggi dan pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Surabaya, berikut disajikan beberapa data yang berkaitan dengan permasalahan dan dukungan pemerintah terhadap program tersebut.

Tabel 1. Data Pendukung Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi dan Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Surabaya

No	Indikator	Data
1.	APK perguruan tinggi Indonesia tahun 2025	32,89%
2.	APK perguruan tinggi Jawa Timur tahun 2025	32,40%
3.	Jumlah penduduk miskin Kota Surabaya (Maret 2025)	105,09 ribu jiwa
4.	Persentase penduduk miskin Kota Surabaya (Maret 2025)	3,56%
5.	Mahasiswa yang telah dibiayai melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana	Sekitar 3.800 anak (2025)
6.	Perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya (2026)	32 perguruan tinggi
7.	Rincian perguruan tinggi mitra	24 PTS dan 8 PTN
8.	Bantuan biaya perkuliahan/pendidikan berdasarkan Perwali Nomor 4 Tahun 2026	Rp2.500.000 per semester
9.	Bantuan uang saku berdasarkan Perwali Nomor 4 Tahun 2026	Rp300.000 per bulan selama 10 bulan dalam satu tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2025), Pemerintah Kota Surabaya (2025, 2026), dan data dalam proposal penelitian (diolah peneliti, 2026).

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pemerataan akses pendidikan tinggi masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. APK perguruan tinggi Indonesia dan Jawa Timur pada tahun 2025 masih berada pada angka 32,89% dan 32,40%. Sementara itu, di Kota Surabaya masih terdapat sekitar 105,09 ribu penduduk miskin dengan persentase sebesar 3,56%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan ekonomi masih menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam penyediaan kesempatan pendidikan. Di sisi lain, Program Satu Keluarga Satu Sarjana telah memberikan pembiayaan kepada sekitar 3.800 anak hingga tahun 2025. Pada tahun 2026, kerja sama program juga melibatkan 32 perguruan tinggi yang terdiri dari 24 perguruan tinggi swasta dan 8 perguruan tinggi negeri. Data tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan program melalui keterlibatan berbagai perguruan tinggi. Namun, capaian jumlah penerima dan mitra kerja sama belum cukup untuk menggambarkan bagaimana proses kerja sama tersebut berlangsung dalam pelaksanaan program.

Dukungan Pemerintah Kota Surabaya terhadap program bantuan pendidikan juga diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan. Dalam peraturan tersebut, bantuan diberikan kepada masyarakat yang

memenuhi kriteria, antara lain keluarga miskin, keluarga pra-miskin, atau masyarakat yang termasuk kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan yang diberikan meliputi biaya perkuliahan atau pendidikan sebesar Rp2.500.000 per semester dan uang saku sebesar Rp300.000 per bulan selama 10 bulan dalam satu tahun sesuai ketentuan. Dukungan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan biaya pendidikan, tetapi juga berupaya membantu kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan. Adanya aturan tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan bantuan pendidikan agar pemberian manfaat dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang ditentukan (Pemerintah Kota Surabaya, 2026a).

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penyesuaian kebijakan melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan. Perubahan peraturan yang ditetapkan pada 17 Juli 2026 tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan bantuan pendidikan, termasuk perluasan dan penyempurnaan sasaran penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya membutuhkan aturan sebagai dasar pelaksanaan, tetapi juga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perubahan ketentuan tersebut tentu membutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan perguruan tinggi agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai persyaratan, mekanisme, serta tanggung jawab masing-masing (Pemerintah Kota Surabaya, 2026b).

Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya secara sendiri karena terdapat pihak lain yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan, menentukan sasaran penerima, menyediakan dukungan pembiayaan, serta melakukan koordinasi dan pengawasan. Sementara itu, perguruan tinggi berperan dalam menyediakan layanan pendidikan, melaksanakan kegiatan akademik, serta mendukung keberlanjutan studi mahasiswa penerima bantuan. Selain kedua pihak tersebut, mahasiswa penerima manfaat juga memiliki peran sebagai pihak yang secara langsung merasakan pelaksanaan program. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan tinggi membutuhkan kerja sama yang saling melengkapi. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan mampu memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Keterlibatan pemerintah daerah dan perguruan tinggi tersebut menjadikan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) sebagai pendekatan yang relevan untuk melihat pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa collaborative governance merupakan bentuk tata kelola yang melibatkan lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan bersama yang bersifat formal, deliberatif, serta berorientasi pada kesepakatan. Artinya, keberhasilan kerja sama tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat atau adanya dokumen kerja sama, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana komunikasi, pembagian peran, kepercayaan, dan komitmen dibangun antar pihak. Dalam konteks program ini, pemerintah dan perguruan tinggi perlu memiliki tujuan yang sama dalam memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, hubungan kerja sama keduanya perlu dilihat sebagai proses yang melibatkan koordinasi dan tanggung jawab bersama.

Meskipun telah melibatkan berbagai perguruan tinggi dan memberikan bantuan kepada ribuan mahasiswa, pelaksanaan program tetap memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Kerja sama yang sudah terbentuk belum tentu menunjukkan bahwa seluruh proses kolaborasi berjalan secara optimal. Masih diperlukan kejelasan mengenai pembagian tugas,

mekanisme komunikasi, proses penyampaian informasi, pendataan penerima, serta penanganan kendala yang mungkin dialami mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, perbedaan kewenangan dan kepentingan antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dapat menjadi tantangan dalam menyamakan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah memiliki aturan dan mekanisme bantuan yang harus dipenuhi, sedangkan perguruan tinggi memiliki ketentuan akademik serta sistem administrasi masing-masing. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat pelaksanaan program. Oleh sebab itu, penting untuk melihat apakah hubungan kerja sama yang terjalin sudah mencerminkan proses kolaborasi yang melibatkan komunikasi, keterbukaan, dan kesepakatan bersama.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan model collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008). Model ini terdiri dari empat aspek utama, yaitu kondisi awal (starting conditions), desain kelembagaan (institutional design), kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership), dan proses kolaborasi (collaborative process). Kondisi awal digunakan untuk melihat latar belakang hubungan, sumber daya, serta dorongan setiap pihak untuk terlibat dalam program. Desain kelembagaan berkaitan dengan aturan kerja sama, keterbukaan, dan kejelasan pembagian tanggung jawab. Selanjutnya, kepemimpinan fasilitatif melihat bagaimana pemerintah memfasilitasi komunikasi, memberikan arahan, dan membantu menyelesaikan kendala yang muncul. Sementara itu, proses kolaborasi berkaitan dengan dialog langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil antara. Keempat aspek tersebut dapat membantu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai hubungan kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dan perguruan tinggi dalam menjalankan program.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai tata kelola kolaboratif dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Surabaya penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada jumlah penerima bantuan atau besarnya pembiayaan yang diberikan, tetapi juga melihat bagaimana proses kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dan perguruan tinggi dibangun serta dilaksanakan. Hal ini penting karena keberhasilan pemerataan pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bantuan biaya, tetapi juga membutuhkan koordinasi, komunikasi, pembagian peran, dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat. Melalui model collaborative governance Ansell dan Gash (2008), penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaborasi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana tata kelola kolaboratif dapat mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu di Kota Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana tata kelola kolaboratif dilaksanakan dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Surabaya. Penelitian ini tidak hanya melihat program dari sisi pemberian bantuan pendidikan, tetapi juga memperhatikan hubungan kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaannya. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami permasalahan sosial berdasarkan pandangan dan pengalaman individu maupun kelompok yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap sesuai untuk menggali informasi mengenai proses komunikasi, koordinasi, pembagian peran, serta komitmen antaraktor dalam mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan proses pelaksanaan tata kelola kolaboratif berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana hubungan kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan perguruan tinggi mitra dalam menjalankan Program Satu Keluarga Satu Sarjana. Selain itu, penelitian juga melihat pengalaman mahasiswa sebagai penerima manfaat untuk mengetahui bagaimana program tersebut dirasakan secara langsung. Moleong (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tindakan, dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih menekankan pada penjelasan mengenai proses kolaborasi daripada pengukuran menggunakan angka atau perhitungan statistik.

Lokasi penelitian berada di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan bantuan pendidikan tinggi kepada masyarakat dari keluarga kurang mampu. Program tersebut melibatkan berbagai pihak, terutama perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan pendidikan dan perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksana. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan pentingnya melihat bagaimana kerja sama antaraktor dilakukan untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi. Dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Surabaya, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kolaborasi dalam kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Fokus penelitian ini adalah tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana dengan menggunakan model Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008). Model tersebut terdiri atas empat aspek, yaitu kondisi awal (starting conditions), desain kelembagaan (institutional design), kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership), dan proses kolaborasi (collaborative process). Kondisi awal digunakan untuk melihat latar belakang keterlibatan masing-masing pihak dalam program. Desain kelembagaan berkaitan dengan aturan, pembagian tugas, dan keterbukaan dalam kerja sama. Kepemimpinan fasilitatif melihat peran pemerintah dalam mengarahkan serta memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, proses kolaborasi digunakan untuk melihat komunikasi, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil kerja sama yang telah dicapai. Keempat aspek tersebut menjadi dasar dalam menyusun pedoman wawancara dan menganalisis hasil penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana melalui wawancara dan observasi. Data tersebut mencakup informasi mengenai proses kerja sama, koordinasi, pembagian tanggung jawab, serta kendala yang dihadapi selama program berlangsung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan wali kota, dokumen kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi, informasi resmi program, data penerima bantuan, serta literatur yang mendukung pembahasan. Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan untuk melengkapi informasi sehingga gambaran mengenai tata kelola kolaboratif dapat dijelaskan secara lebih menyeluruh.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana. Informan penelitian mencakup pihak pemerintah daerah, perguruan tinggi mitra, dan mahasiswa penerima manfaat. Dari pihak pemerintah, informasi diperoleh dari Dinas Sosial Kota Surabaya serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota “Bappeko” Kota Surabaya sesuai dengan keterlibatan

masing-masing dalam program. Selain itu, penelitian melibatkan perwakilan pengelola beasiswa atau bagian kemahasiswaan dari perguruan tinggi mitra serta mahasiswa penerima bantuan. Pemilihan informan dari beberapa pihak tersebut dilakukan agar informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari sudut pandang pemerintah, tetapi juga menggambarkan pengalaman pihak yang bekerja sama dan menerima manfaat program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun berdasarkan empat aspek Collaborative Governance Ansell dan Gash. Pertanyaan wawancara diarahkan untuk menggali informasi mengenai alasan keterlibatan para pihak, bentuk kerja sama, pembagian tanggung jawab, komunikasi, koordinasi, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan program. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program sesuai dengan akses yang dimiliki peneliti. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan, dokumen kerja sama, laporan kegiatan, data program, dan informasi resmi dari instansi terkait. Ketiga teknik tersebut digunakan agar peneliti memperoleh informasi yang saling melengkapi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Pada tahap kondensasi data, peneliti memilih dan mengelompokkan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah dikelompokkan disusun dalam bentuk uraian deskriptif agar lebih mudah dipahami. Penyajian data dilakukan berdasarkan empat aspek teori Ansell dan Gash sehingga hubungan antara temuan lapangan dengan fokus penelitian dapat terlihat dengan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu memahami makna dari data yang telah diperoleh serta melakukan pemeriksaan kembali agar kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan fakta penelitian.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pihak pemerintah daerah, perguruan tinggi mitra, dan mahasiswa penerima manfaat. Melalui perbandingan tersebut, peneliti dapat mengetahui apakah informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak memiliki kesesuaian atau justru menunjukkan perbedaan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Sebagai contoh, informasi mengenai mekanisme kerja sama yang disampaikan oleh informan dapat diperiksa kembali melalui dokumen kerja sama atau peraturan yang berkaitan dengan program. Penggunaan triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam memahami informasi yang diperoleh.

Melalui rangkaian metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Surabaya. Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan empat aspek Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008). Dengan demikian, penelitian tidak hanya menjelaskan bentuk kerja sama yang telah dilakukan, tetapi juga melihat bagaimana komunikasi, kepercayaan, kepemimpinan, pembagian peran, dan komitmen dibangun oleh pihak-pihak yang terlibat. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana proses kolaborasi mendukung upaya pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu di Kota Surabaya.

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 18 No 12, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana dirancang untuk menyasar kelompok Masyarakat kurang mampu sebagai sasaran utama dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia sehingga menurunkan angka kemiskinan di kota Surabaya. Namun cakupan program masih terbatas karena program ini hanya mampu menampung beberapa keluarga miskin saja, sehingga tidak semua keluarga kurang mampu dapat menerima program ini, terutama bagi keluarga yang belum atau tidak memenuhi kriteria dan tidak bersedia mengikuti sistem asrama sebagai syarat penerimaan program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana. Dari segi manfaat program ini memberikan dukungan bagi penerima bantuan berupa akses layanan pendidikan tinggi, pembiayaan pendidikan tinggi, uang saku, penyediaan tempat tinggal, konsumsi harian bagi penerima program, fasilitas belajar seperti internet, komputer, hingga ruang belajar di asrama.

Dukungan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat secara signifikan. Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat jangka Panjang bagi penerima manfaat agar kualitas hidup di masa depan meningkat dan menjadi lebih baik dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antar genereasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Veronika Yocelinanda Februanti, S.KM. dari Dinas Sosial Kota Surabaya dan Ibu Puspita Ayuningtyas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya, diketahui bahwa Program Satu Keluarga Satu Sarjana dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu agar memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh pendidikan tinggi.

Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan pendidikan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara, cakupan penerima manfaat belum dapat menjangkau seluruh keluarga kurang mampu yang membutuhkan bantuan pendidikan tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan daya tampung program dan adanya sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima manfaat. Salah satu persyaratan yang menjadi pertimbangan adalah kesediaan mengikuti sistem pendidikan berbasis asrama. Kondisi ini menyebabkan terdapat keluarga yang belum memenuhi kriteria atau tidak bersedia mengikuti sistem asrama sehingga belum dapat memperoleh kesempatan mengikuti program.

Pemerintah Kota Surabaya kemudian menghadirkan program ini sebagai upaya memberikan kesempatan kepada keluarga kurang mampu agar anggota keluarganya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana. Jika dilihat dari aspek kondisi awal (starting conditions), kolaborasi terbentuk karena adanya permasalahan ketimpangan akses pendidikan tinggi dan keterbatasan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk melibatkan pihak lain dalam mendukung pelaksanaan program. Pada aspek desain kelembagaan *(institutional design)*, sudah terdapat pembagian peran antara Dinas Sosial, Bappeda, UPTD Liponsos Kalijudan, Yayasan Bakti Persatuan, dan perguruan tinggi. Pembagian tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan program telah memiliki keterlibatan lintas lembaga yang saling melengkapi. Selanjutnya, pada aspek kepemimpinan fasilitatif *(facilitative leadership)*, Bappeda berperan sebagai koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, sedangkan Dinas Sosial berperan dalam pengaturan serta penentuan sasaran penerima manfaat.

Pada aspek proses kolaborasi (*collaborative process*), kerjasama terlihat melalui pembagian tugas, koordinasi, survei calon penerima manfaat, dan pemberian dukungan pendidikan secara menyeluruh. Dukungan berupa biaya pendidikan, uang saku, tempat tinggal, konsumsi, internet, komputer, dan ruang belajar menunjukkan bahwa kolaborasi telah menghasilkan manfaat nyata bagi penerima program. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala

berupa keterbatasan daya tampung dan persyaratan sistem asrama yang menyebabkan sebagian keluarga kurang mampu belum dapat mengikuti program. Dapat diinterpretasikan bahwa tata kelola kolaboratif dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Surabaya telah menunjukkan adanya kerja sama antara pemerintah dan pihak nonpemerintah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi. Keempat aspek teori Ansell dan Gash (2008) telah memperlihatkan dasar pembentukan, pengaturan, koordinasi, dan pelaksanaan kolaborasi. Akan tetapi, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi, terutama dalam memperluas jangkauan penerima manfaat, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memperhatikan masyarakat yang belum dapat mengikuti sistem asrama.

Program ini melibatkan beberapa pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda. Dinas Sosial Kota Surabaya berperan dalam mengatur dan menentukan sasaran penerima manfaat, sedangkan UPTD Liponsos Kalijudan bertindak sebagai pelaksana teknis program. Bappeda Kota Surabaya memiliki peran dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program. Selain itu, terdapat Yayasan Bakti Persatuan yang berperan sebagai penyokong pendanaan serta perguruan tinggi negeri maupun swasta yang turut terlibat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Keberhasilan Program Satu Keluarga Satu Sarjana tidak hanya dapat dilihat dari tersedianya bantuan pendidikan, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat membangun kerja sama dalam pelaksanaannya. Keterlibatan Dinas Sosial, Bappeda, UPTD, yayasan, dan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam memastikan program dapat berjalan sesuai tujuan.

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu kondisi awal *(starting conditions),* desain kelembagaan *(institutional design),* kepemimpinan fasilitatif *(facilitative leadership),* dan proses kolaborasi *(collaborative process)*. Keempat aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana hubungan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana, mulai dari kondisi yang melatarbelakangi terbentuknya kolaborasi hingga proses pelaksanaan program dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi.

1. Kondisi Awal *(Starting Conditions)*

   Menurut Ansell dan Gash (2008), kondisi awal berkaitan dengan ketidakseimbangan sumber daya dan kekuasaan antarpihak, dorongan untuk berpartisipasi, serta pengalaman kerja sama maupun konflik yang pernah terjadi sebelumnya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesediaan setiap pihak untuk terlibat dan menentukan bagaimana kolaborasi dapat dibangun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Veronika Yocelinanda Februanti, S.KM. dari Dinas Sosial Kota Surabaya dan Ibu Puspita Ayuningtyas dari Bappeda Kota Surabaya, diketahui bahwa salah satu alasan dibentuknya Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah masih adanya ketimpangan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi. Faktor ekonomi menjadi hambatan utama karena biaya pendidikan di perguruan tinggi dianggap cukup tinggi bagi keluarga yang memiliki keterbatasan penghasilan. Selain itu, distribusi perguruan tinggi dan program studi yang belum merata juga menjadi faktor yang memengaruhi kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan tinggi belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu.

   Jika dikaitkan dengan teori Ansell dan Gash (2008), kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan sumber daya *(power-resource asymmetries)* yang menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kolaborasi. Dalam konteks program ini, masyarakat kurang mampu memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi untuk membiayai pendidikan

anaknya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan dan mengatur bantuan, tetapi tetap membutuhkan dukungan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan program. Selain ketimpangan sumber daya, terdapat dorongan untuk berpartisipasi *(incentives for and constraints on participation)* yang terlihat dari tujuan masing-masing pihak dalam pelaksanaan program. Pemerintah Kota Surabaya memiliki kepentingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Dinas Sosial memiliki kepentingan dalam memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sedangkan Bappeda memiliki kepentingan dalam memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, Yayasan Bakti Persatuan dan perguruan tinggi turut memberikan dukungan sesuai dengan peran masing-masing.

2. Desain Kelembagaan *(Institutional Design)*

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa desain kelembagaan diperlukan agar setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman mengenai kedudukan, tanggung jawab, dan aturan yang harus dijalankan. Desain kelembagaan yang jelas dapat membantu mencegah terjadinya tumpang tindih tugas dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kerja sama. Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Surabaya melibatkan beberapa lembaga dengan pembagian tugas yang berbeda. Dinas Sosial Kota Surabaya berperan sebagai pihak yang mengatur program dan memastikan calon penerima bantuan berasal dari keluarga yang sesuai dengan kriteria. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Sosial bekerja sama dengan UPTD Liponsos Kalijudan untuk melakukan survei kepada masyarakat. Penentuan calon penerima manfaat mempertimbangkan beberapa kondisi, seperti pendapatan keluarga, keadaan tempat tinggal, dan kepemilikan aset. Proses tersebut menunjukkan bahwa penentuan penerima manfaat tidak hanya didasarkan pada pengajuan bantuan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Bappeda Kota Surabaya memiliki peran sebagai koordinator program, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Peran ini menunjukkan bahwa Bappeda tidak hanya terlibat pada tahap awal perencanaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melihat bagaimana program dijalankan dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. UPTD Liponsos Kalijudan menjalankan fungsi teknis, sedangkan Yayasan Bakti Persatuan memberikan dukungan pendanaan. Perguruan tinggi negeri maupun swasta juga dilibatkan melalui program CSR untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penerima manfaat.

Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana telah melibatkan unsur pemerintah dan nonpemerintah. Jika dikaitkan dengan konsep *participatory inclusiveness* dari Ansell dan Gash (2008), keterlibatan berbagai pihak merupakan salah satu unsur penting dalam desain kelembagaan. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengkoordinasikan program, sedangkan yayasan dan perguruan tinggi memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kapasitasnya. Dari sisi kejelasan aturan *(clear ground rules)*, pembagian tugas antar lembaga yang telah dijelaskan dalam hasil wawancara menunjukkan adanya pengaturan tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap pengaturan dan penentuan sasaran penerima manfaat, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi, UPTD berperan dalam pelaksanaan teknis, sedangkan yayasan dan perguruan tinggi memberikan dukungan terhadap kebutuhan program.

3. Kepemimpinan Fasilitatif *(Facilitative Leadership)*

Kepemimpinan fasilitatif berfungsi memberi arah, mempertemukan para pihak, menjaga proses tetap berjalan, dan memberdayakan pihak yang posisinya lebih lemah (Ansell & Gash,

2008). Pemimpin dalam hal ini tidak harus perorangan. Sebuah lembaga yang diterima para pihak sebagai penggerak dan penengah juga dapat menjalankan fungsi tersebut (Provan & Kenis, 2008). Bappeda Kota Surabaya memiliki peran sebagai koordinator Program Satu Keluarga Satu Sarjana. Peran tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program. Kedudukan Bappeda sebagai koordinator menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan berbagai pihak yang terlibat agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Koordinasi tersebut diperlukan karena program melibatkan lembaga yang memiliki fungsi berbeda, mulai dari pengaturan penerima manfaat, pelaksanaan teknis, penyediaan dana, hingga dukungan pendidikan tinggi.

Dinas Sosial Kota Surabaya juga memiliki peran penting dalam menjaga agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan sasaran. Melalui kerja sama dengan UPTD Liponsos Kalijudan, Dinas Sosial melakukan survei terhadap kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan pendapatan, tempat tinggal, dan kepemilikan aset. Langkah ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Jika dikaitkan dengan teori Ansell dan Gash (2008), peran Bappeda sebagai koordinator dan Dinas Sosial sebagai pengatur program menunjukkan adanya fungsi fasilitasi dalam membangun hubungan kerja antarlembaga. Bappeda memiliki posisi strategis untuk memastikan setiap pihak memahami arah dan tujuan program, sedangkan Dinas Sosial berperan dalam menghubungkan kebijakan bantuan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi sehingga koordinasi menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keberlangsungan program.

Kepemimpinan fasilitatif tidak cukup hanya dilihat dari adanya lembaga yang bertindak sebagai koordinator. Hal yang lebih penting adalah bagaimana koordinasi tersebut mampu mendorong keterlibatan aktif setiap pihak, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan hambatan yang muncul selama pelaksanaan program. Sebagai contoh, keterbatasan daya tampung dan adanya calon penerima manfaat yang tidak bersedia mengikuti sistem asrama merupakan persoalan yang membutuhkan koordinasi antara pihak. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tugas administratif, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah dan pihak pendukung mencari solusi agar masyarakat yang membutuhkan tetap memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi. kepemimpinan fasilitatif juga perlu memperhatikan keseimbangan kepentingan antara lembaga pelaksana dan masyarakat penerima manfaat. Pemerintah tentu memiliki ketentuan dan kemampuan anggaran yang harus dipertimbangkan, sedangkan masyarakat memiliki kebutuhan serta kondisi keluarga yang berbeda-beda.

4. Proses Kolaborasi *(Collaborative Process)*

Proses kolaborasi *(collaborative process)* merupakan bagian utama dalam teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008). Proses ini menjelaskan bagaimana para pihak yang terlibat membangun hubungan kerja sama melalui dialog langsung *(face-to-face dialogue)*, membangun kepercayaan *(trust building)*, menciptakan komitmen terhadap proses *(commitment to process)*, membangun pemahaman bersama *(shared understanding)*, dan menghasilkan capaian sementara maupun hasil nyata *(intermediate outcomes)*.

a. Dialog Langsung *(Face-to-Face Dialogue)*

Dialog langsung merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kolaborasi karena memungkinkan setiap pihak menyampaikan kepentingan, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi. Dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana, keterlibatan Dinas Sosial, Bappeda, UPTD Liponsos Kalijudan, Yayasan Bakti Persatuan, dan perguruan

tinggi menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi antar lembaga.

Bappeda memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program. Sementara itu, Dinas Sosial bekerja sama dengan UPTD Liponsos Kalijudan dalam melakukan survei terhadap masyarakat yang menjadi calon penerima manfaat. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan kerja antara lembaga yang memiliki tanggung jawab berbeda. Komunikasi antarlembaga diperlukan agar informasi mengenai calon penerima manfaat, kebutuhan pendidikan, dan dukungan yang harus disediakan dapat dikelola dengan baik.

b. Membangun Kepercayaan *(Trust Building)*

Membangun kepercayaan merupakan proses untuk menciptakan keyakinan bahwa setiap pihak akan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan. Dalam pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana, kepercayaan dapat dilihat dari adanya pembagian peran antara lembaga pemerintah dan pihak nonpemerintah. Dinas Sosial bertanggung jawab dalam pengaturan sasaran penerima manfaat, UPTD membantu pelaksanaan teknis, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi, Yayasan Bakti Persatuan memberikan dukungan pendanaan, dan perguruan tinggi turut mendukung pelaksanaan pendidikan.

c. Komitmen terhadap Proses *(Commitment to Process)*

Komitmen terhadap proses menunjukkan kesediaan setiap pihak untuk terus terlibat dan menjalankan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan bersama. Dalam program ini, komitmen dapat dilihat dari keterlibatan beberapa lembaga yang memberikan dukungan berdasarkan fungsi masing-masing. Pemerintah melalui Dinas Sosial dan Bappeda menjalankan peran pengaturan dan koordinasi, sedangkan UPTD, yayasan, dan perguruan tinggi memberikan dukungan teknis, pendanaan, dan pendidikan. Komitmen tersebut juga terlihat dari bentuk dukungan yang diberikan kepada penerima manfaat. Program tidak hanya menyediakan pembiayaan pendidikan tinggi, tetapi juga memberikan uang saku, tempat tinggal, konsumsi harian, internet, komputer, dan ruang belajar di asrama. Berbagai fasilitas tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan penerima manfaat diperhatikan secara lebih menyeluruh.

d. Pemahaman Bersama *(Shared Understanding)*

Pemahaman bersama merupakan kondisi ketika seluruh pihak yang terlibat memiliki pandangan yang sama mengenai permasalahan, tujuan, dan arah pelaksanaan program. Dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana, pemahaman bersama dapat dilihat dari kesamaan tujuan para pihak dalam memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada masyarakat kurang mampu. Program ini tidak hanya dipandang sebagai bantuan pendidikan, tetapi juga sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya.

e. Hasil Sementara *(Intermediate Outcomes)*

Hasil sementara merupakan capaian yang diperoleh selama proses kolaborasi berlangsung dan dapat menjadi dasar untuk memperkuat kerja sama antarpihak. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan kecil (small wins) dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen para pihak untuk melanjutkan kolaborasi. Dalam pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana, salah satu capaian yang dapat dilihat adalah tersedianya berbagai bentuk dukungan pendidikan bagi penerima manfaat. Adanya pembiayaan pendidikan tinggi, uang saku, tempat tinggal, konsumsi, internet, komputer, dan ruang belajar di asrama merupakan bentuk hasil nyata dari keterlibatan berbagai pihak. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi telah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh penerima program.

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 18 No 12, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Surabaya telah melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak nonpemerintah. Kolaborasi tersebut melibatkan Dinas Sosial, Bappeda, UPTD Liponsos Kalijudan, Yayasan Bakti Persatuan, serta perguruan tinggi negeri dan swasta. Jika dianalisis menggunakan empat dimensi *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), pelaksanaan program ini telah menunjukkan adanya dasar pembentukan kolaborasi, pembagian peran, koordinasi, dan keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi.

Pada dimensi kondisi awal (*starting conditions*), kolaborasi terbentuk karena adanya ketimpangan akses pendidikan tinggi dan keterbatasan ekonomi keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melibatkan pihak lain karena kebutuhan pelaksanaan program tidak dapat dipenuhi hanya oleh pemerintah daerah. Pada dimensi desain kelembagaan (*institutional design*), pembagian peran antaraktor telah terlihat melalui keterlibatan Dinas Sosial dalam pengaturan program dan penentuan sasaran penerima manfaat, UPTD Liponsos Kalijudan dalam pelaksanaan teknis, Bappeda sebagai koordinator, serta Yayasan Bakti Persatuan dan perguruan tinggi yang turut memberikan dukungan terhadap keberlangsungan program.

Pada dimensi kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), Bappeda berperan dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Sementara itu, Dinas Sosial berperan dalam memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan sasaran program. Selanjutnya, pada dimensi proses kolaborasi (*collaborative process*), kerja sama terlihat melalui pembagian tugas, koordinasi, survei calon penerima manfaat, serta pemberian dukungan pendidikan secara menyeluruh. Dukungan tersebut meliputi biaya pendidikan, uang saku, tempat tinggal, konsumsi, dan fasilitas belajar di asrama. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi telah memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh mahasiswa penerima program.

Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan daya tampung menyebabkan belum seluruh keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan menjadi penerima manfaat. Selain itu, adanya persyaratan tertentu, terutama kesediaan mengikuti sistem asrama, menjadi salah satu pertimbangan yang membuat sebagian masyarakat belum dapat mengikuti program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerataan akses pendidikan tinggi melalui program ini masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana telah mendukung upaya pemerataan akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu di Kota Surabaya. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan, terutama dalam memperluas jangkauan penerima manfaat, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperhatikan kondisi masyarakat yang belum dapat memenuhi persyaratan program. Dengan demikian, koordinasi dan kerja sama antaraktor perlu terus ditingkatkan agar manfaat program dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2025). Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 3,56 persen. BPS Kota Surabaya.

Badan Pusat Statistik. (2025). Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT) menurut provinsi, 2025. Badan Pusat Statistik.

Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

JatimTimes. (2025, 26 April). *Lewat Omah Ilmu Arek Suroboyo, anak penerima program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana bisa kuliah gratis.* https://jatimtimes.com/baca/336078/20250426/110400/privacy

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Kota Surabaya. (2026a). Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan. JDIH Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya. (2026b). Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan. JDIH Kota Surabaya.

Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(2), 229–252.

RRI. (2026, 9 Juli). *ICMI Jatim dukung Program Satu Keluarga Satu Sarjana Pemkot Surabaya*.https://rri.co.id/surabaya/info-pemda/2556685/icmi-jatim-dukung-program-satu-keluarga-satu-sarjana-pemkot-surabaya

Suara Surabaya. (2024). *DPRD komitmen kawal program Pemkot Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana tepat sasaran.* https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/dprd-komitmen-kawal-program-pemkot-satu-keluarga-satu-sarjana-tepat-sasaran/

Suryadi, A. (2012). Pendidikan, investasi SDM, dan pembangunan: Isu, teori, dan aplikasi untuk pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia. Widya Aksara Press.

Tilaar, H. A. R. (2012). Kaleidoskop pendidikan nasional. Kompas.

Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2016). Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Pustaka Pelajar.